

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan menjadi poin krusial yang “menguras” perhatian pemerintah, khususnya di negara-negara berkembang. Masalah ketimpangan masih menjadi isu besar pembangunan di negara-negara berkembang. Tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak mencakup aspek ekonomi saja, namun meliputi aspek multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Masyarakat umum menjadi sasaran tunggal dari pembangunan. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang tepat dan terukur, strategi hingga evaluasi pembangunan yang tepat

Pembangunan tidak mencakup aspek ekonomi saja, namun meliputi aspek multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Masyarakat umum menjadi sasaran tunggal dari pembangunan. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang tepat dan terukur, strategi hingga evaluasi pembangunan yang tepat.

Pelaksanaan pembangunan harus tepat sasaran yaitu masyarakat. Evaluasi yang tepat berarti pembangunan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam tingkatan instansi, departemen, ataupun pihak swasta. Dalam prakteknya hal ini sering menjadi poin yang terabaikan, sehingga banyak aspek esensial yang sebenarnya membutuhkan perhatian yang lebih justru dikesampingkan.

Perbedaan kebutuhan masyarakat ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan Indonesia yang diharapkan mampu tepat perencanaan, tepat sasaran hingga tepat evaluasinya. Pada tahapan evaluasi, pemerintah mungkin saja berhasil mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah yang telah dikerjakan tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (merata). Seringkali didapati bahwa pembangunan Indonesia belum merata secara nasional, dan ketimpangan antar wilayah satu dengan lainnya haruslah menjadi bahan evaluasi.

Masalah lain yang menyebabkan ketimpangan pembangunan adalah, seringkali kebijakan pembangunan disamakan untuk setiap daerah. Tentu saja, penerapan kebijakan harus memperhatikan unsur-unsur regional (lokal) setiap daerah agar dapat menyusun perencanaan dan strategi pembangunan yang tepat. Sektor unggulan dalam perekonomian daerah menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus berpartisipasi dengan masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya agar merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Potensi harus digali dari segala sektor, akan ada sektor yang menjadi basis dan juga sektor yang bukan basis bagi pembangunan daerah. Sektor basis harus diprioritaskan untuk dikembangkan, dan sektor bukan basis tetap dibangun, namun menjadi prioritas berikutnya. Ketepatan analisis potensi daerah ini juga sangat dibutuhkan oleh Provinsi Jambi. Sebagai provinsi yang memiliki wilayah

seluas 51.160  $km^2$ , dan dengan jumlah penduduk sebesar 3,566.579 jiwa (2019) tentunya menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Provinsi ini memiliki banyak sektor-sektor yang jika dikelola secara baik dan berkelanjutan tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Ketepatan analisis potensi daerah ini juga sangat dibutuhkan oleh Provinsi Jambi. Sejak berdiri hingga saat ini, Provinsi Jambi sudah banyak perubahan yang cukup signifikan Provinsi ini. Banyak potensi yang terdapat di Provinsi Jambi, namun memang hampir semua tidak tergali secara optimal sehingga tidak mampu mendongkrak lebih tinggi PDRB Provinsi Jambi. Khususnya dari sektor perkebunan, Provinsi Jambi dikenal sebagai penghasil sawit, karet, kopi, kentang, kayu manis .

Sektor lain yang potensial dikembangkan yaitu sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Pemerintah Provinsi Jambi harus mengetahui sektor-sektor apa saja yang menjadi unggulan Provinsi tersebut. Karena hal ini sangat erat kaitanya dengan peningkatan pembangunan daerah dan rencana strategi perencanaan yang matang, serta kemampuan pemerintah untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. Indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting disuatu wilayah yang dapat mengidentifikasi totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Berikut tabel laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi :

**Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2018-2020 (persen)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kerinci	5,14	5,1	5,02
2	Merangin	5	5,17	4,51
3	Sarolangun	4,99	4,72	5,08
4	Bungo	4,71	4,72	4,34
5	Tebo	5	5,02	4,78
6	Batanghari	4,96	4,96	4,99
7	Muaro Jambi	5,12	5,27	5,06
8	Tanjung Jabung Barat	6,8	6,89	5,15
9	Tanjung Jabung Timur	3,09	3,13	4,25
10	Kota Jambi	5,26	5,48	5,33
11	Kota Sungai Penuh	5,04	5,54	5,12
JAMBI		5,01	5,09	4,88

*Sumber : BPS Provinsi Jambi*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 tercatat 6 kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas rata rata di Provinsi Jambi (4,88%) , yaitu Kabupaten Kerinci (5,02%), Kabupaten Sarolangun (5,08%), Kabupaten Muaro Jambi (5,06%), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (5,15%), Kota Jambi (5,33%), dan Kota Sungai Penuh (5,12%). Sementara kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata provinsi yaitu, Kabupaten Merangin (4,51%), Kabupaten Bungo (4,34%), Kabupaten Tebo (4,78%), Kabupaten Batanghari (4,99%), sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah dengan rata-rata pertumbuhan terendah pada 2020 (4,25%). Hal ini menunjukkan setiap wilayah memiliki kinerja dan kemampuan ekonomi yang berbeda, pada dasarnya juga dipengaruhi dengan sumber daya yang terdapat didaerah tersebut.

**Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2018-2020 (persen)**

Sektor	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jambi (Persen)		
	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,35	2,94	1,53
Pertambangan dan Penggalian	5,89	4,73	-2,21
Industri Pengolahan	3,39	2,58	0,23
Pengadaan Listrik dan Gas	5,61	5,82	4,59
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah	4,24	4,00	1,98
Konstruksi	5,22	6,90	0,88
Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,94	5,91	-3,54
Transportasi dan Pergudangan	5,21	3,59	-14,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,07	5,62	-6,83
Informasi dan Komunikasi	7,53	6,20	8,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,14	1,92	6,97
Real estate	5,04	6,91	-0,47
Jasa Perusahaan	4,67	3,96	-5,73
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,37	5,49	-2,39
Jasa Pendidikan	5,44	5,75	3,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,54	7,12	6,76
Jasa lainnya	5,52	4,14	-3,63
PDRB	4,69	4,37	-0,46

*Sumber : BPS Provinsi Jambi*

Pada tahun 2018-2020, dapat diketahui sektor sektor bergerak secara fluktuatif, namun dapat dirata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,60%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,80%, sektor industri dan pengolahan sebesar 2,06%, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 5,34%, sektor

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,40%, sektor konstruksi sebesar 4,33%.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,77%, sektor transportasi dan pergudangan sebesar -5,63%, sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum sebesar 1,62%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,40%, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,91%, sektor real estate sebesar 2,61%, sektor jasa perusahaan sebesar 0,96%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 2,49%, sektor jasa pendidikan sebesar 4,78%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,47%, sektor jasa lainnya sebesar 2,01%.

**Tabel 1.3 Kontribusi Sektor PDRB Provinsi Jambi ADHK Menurut Lapangan Usaha 2018-2020**

No	Sektor	Kontribusi (%)			rata-rata
		2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,62	26,26	26,78	26,66
B	Pertambangan dan Penggalian	23,87	23,95	23,53	23,73
C	Industri Pengolahan	10,59	10,41	10,48	10,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,14	0,13
F	Konstruksi	7,23	7,40	7,50	7,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,73	9,87	9,57	9,70
H	Transportasi dan Pergudangan	3,30	3,28	2,82	3,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,14	1,07	1,11
J	Informasi dan Komunikasi	3,71	3,77	4,11	3,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,19	2,35	2,28
L	Real Estate	1,45	1,48	1,48	1,46
M,N	Jasa Perusahaan	1,05	1,05	0,99	1,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,41	3,45	3,38	3,42
P	Jasa Pendidikan	3,29	3,33	3,45	3,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,19	1,28	1,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,04	1,04	1,00	1,03
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber : BPS( Data Diolah)*

Dari data diatas terlihat bahwa peran sektor terhadap pertumbuhan ekonomi masih bergantung ataupun didominasi dari sektor primer. Meskipun pertumbuhan dari sektor-sektor diluar sektor primer menunjukkan angka yang

besar, namun kontribusinya masih rendah, dan komoditas primer ekstraktif masih menjadi sektor dengan kontribusi yang besar.

Sejauh ini pengembangan sektoral ekonomi yang menjadi unggulan di Provinsi Jambi masih terbatas pada komoditas primer. Keterbatasan pada sektor unggulan tersebut dapat terlihat dari peran sektor pertumbuhan yang masih rendah. Selain itu, keterlibatan masyarakat masih terbatas dan kecil ruang lingkungannya sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mengamati kondisi yang demikian penulis merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah Provinsi Jambi, sehingga akan meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dan mengintensifkan pembangunan berdasarkan sumber-sumber kekayaan sektoral di Provinsi Jambi. Adapun judul yang penulis angkat adalah “Analisis Sektor Unggulan Provinsi Jambi”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berbagai sektor-sektor dan sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Jambi merupakan sumber kekayaan yang harus dimanfaatkan dalam proses pembangunan daerah ini. Ketersediaan sumberdaya alam di berbagai sektor ini merupakan peluang besar yang harusnya dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Jambi.

Secara teoritis, sektor potensial merupakan sektor yang menjadi prioritas dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Apabila sektor potensial dapat dikembangkan dengan baik, tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Provinsi Jambi memiliki potensi yang besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mampu menjadi daerah yang berdaya saing baik antar kabupaten dalam Provinsi Jambi, atau bahkan Nasional. Namun sayangnya, masih banyak potensi-potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hal seperti inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis apa saja yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah Provinsi Jambi agar dapat mengetahui strategi dan langkah apa sajakah yang diperlukan sehingga dapat mendorong terciptanya kemajuan disegala bidang. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah Provinsi Jambi
2. Bagaimanakah pangsa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jambi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang menjadi unggulan bagi perekonomian Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui pangsa dan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan perekonomian

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademis

Secara akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan tentang sektor unggulan dalam perekonomian regional provinsi jambi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, khususnya pengembangan sektor-sektor unggulan didalam wilayah regional provinsi jambi.